

**POINTERS KEYNOTE SPEAKER
PADA FESTIVAL KARTINI KE-IV TAHUN 2016**

Jepara, 16 April 2016

Yang terhormat :

- Sdr. Bupati Kabupaten Jepara
- Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara,
dan
- Para Peserta dan Hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

- Pertama-tama perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan ridho-Nya kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.
- Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Sdr. Bupati dan segenap jajarannya, yang menyelenggarakan Seminar Nasional Perempuan Membangun Bangsa dan Negara

dengan tema “*Spirit Kartini dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, Kreatif dan Berkarakter*” yang merupakan bagian dari Kegiatan Festival Kartini IV tahun 2016.

- Spirit Kartini dalam membangun Bangsa yang Mandiri, Kreatif dan Berkarakter perlu kita wariskan secara terus menerus kepada seluruh generasi bangsa kita, dan secara khusus ditujukan kepada perempuan, anak perempuan, dan remaja putri, sebagai panutan yang diharapkan dapat memberikan motivasi untuk selalu bersemangat dan aktif dalam mengembangkan potensi diri menuju generasi yang mandiri dan berkarakter.
- Meningkatnya kualitas hidup dan Peran Perempuan merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada RPJMN 2015-2019. Upaya membangun kualitas manusia merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembagunan Gender (IPG). IPM mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang: kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (Rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (produk domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Sedangkan IPG merupakan IPM yang sudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Berdasarkan publikasi *Human Development Report (HDR) 2012-2013*, Indonesia berada pada peringkat ke 5 dari 10 Negara ASEAN dan Peringkat 108 dari seluruh negara-negara didunia.

Sementara nilai IPG berdasarkan hasil penghitungan BPS, pada tahun 2013 sebesar 69,57, artinya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar apabila kita bandingkan dengan kualitas hidup laki-laki.

- Beberapa aspek penting yang merupakan penghambat upaya peningkatan kualitas hidup perempuan antara lain ditunjukkan pada capaian sebagai berikut:

1) Dibidang Pendidikan, bahwa capaian rata-rata lama sekolah anak Indonesia, pada tahun 2014 adalah 8,24 tahun untuk laki-laki, dan 7,23 tahun

untuk perempuan. Artinya secara umum penduduk perempuan di Indonesia belum mencapai kebijakan wajib belajar 9 tahun yakni lulus sekolah lanjutan pertama (SLTP).

2) Dibidang Kesehatan: Pelayanan kesehatan pada perempuan di Indonesia (khususnya ibu pada masa kehamilan dan melahirkan) masih perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menandakan kualitas layanan kesehatan perempuan masih memprihatinkan. Berdasarkan SDKI 2012, AKI di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Indonesia merupakan peringkat-8 dari 10 Negara ASEAN (diatas LAOS dan Kamboja). Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap jam terdapat 2 (dua) perempuan yang meninggal dunia akibat peristiwa kehamilan dan melahirkan. Dengan jumlah kelahiran sekitar 4,3 juta pada tahun 2012, berarti setiap tahun ada sekitar 15 ribu ibu melahirkan yang meninggal dunia. Untuk itu diperlukan akses menyeluruh pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk program keluarga berencana, informasi dan pendidikan serta pengintegrasian kesehatan reproduksi dalam program dan strategi nasional.

3) Dibidang ekonomi: Masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini disebabkan oleh aksesibilitas perempuan dalam kesempatan kerja, sehingga akumulasi upah perempuan secara keseluruhan menjadi sangat rendah. Kontribusi sumbangan pendapatan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Pada tahun 2014 sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 35,64. Proporsi perempuan pekerja tanpa imbalan jasa lebih tinggi jumlahnya dari pada laki-laki. Akumulasi kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan pengeluaran per kapita perempuan jauh tertinggal dari laki-laki.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan ekonomi produktif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini memberikan perhatian pada Pemberdayaan Industri Rumahan. Karena Industri rumahan pelakunya sebagian besar adalah perempuan. Untuk itu Kementerian PP dan PA mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku industri rumahan, untuk dibimbing sebagai pemula, berkembang dan maju yang selanjutnya menjadi pengusaha kecil.

Dalam kegiatan festival ini; Kementerian PP dan PA mendorong perlunya pemberdayaan

perempuan ekonomi produktif, melalui pameran produk-produk unggulan hasil perempuan ekonomi produktif di 34 provinsi di Indonesia.

- 4) **Dibidang Politik:** Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan penghitungan terakhir sebesar 17,23 persen dan berusaha mencapai 30 persen sebagaimana target yang ditetapkan. Pemerintah melakukan pemetaan secara seksama untuk mengetahui representasi dan kebutuhan perempuan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, serta memberikan informasi dan pelatihan pada politik dan kepemimpinan untuk perempuan. Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender
- 5) Berbagai kasus terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan faktor penghambat pada upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Angka kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak perdagangan orang menunjukkan peningkatan.

Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setiap tahun sedikitnya 450.000 orang (70%-nya adalah perempuan) pada umumnya mereka diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46% terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kesemua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

- Untuk itu sejalan dengan berbagai permasalahan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2016 menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan ***Three end*** (3 end) yang meliputi:
 - 1) Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak.
 - 2) Akhiri perdagangan perempuan, dan
 - 3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan

- Meskipun dalam beberapa bidang perempuan masih tertinggal, namun di mata dunia, kemajuan kesetaraan gender di Indonesia patut diapresiasi. Forum PBB bulan September 2015 lalu di New York, seluruh negara anggota PBB bersama UN Woman memasukan Indonesia sebagai satu dari 10 negara yang dipersiapkan untuk menuju Planet 50:50 pada 2030 mendatang.

Dengan demikian tugas berat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawa perempuan setara dengan laki-laki, tidak lagi seperti saat ini 30 perempuan dan laki-laki 70.

Forum tersebut juga mengampanyekan gerakan "*He for She*", sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, ekonomi.

- Kementerian PP dan PA memiliki fungsi koordinatif dan menjadi strategi penting dalam kampanye global *he for she*, melalui beberapa upaya antara lain:
 - 1) upaya mendorong pencapaian minimal 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Peningkatan Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
 - 2) Mendorong upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, dan peningkatan akses pelayanan vital kesehatan reproduksi
 - 3) Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

- Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap berkomitmen untuk senantiasa memikirkan kemajuan perempuan Indonesia, guna mencapai kesetaraan gender, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise